

PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA MINIMUM OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI

CHRISTINA, SISKA

Pembimbing : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.

CORRUPTION; CRIMINAL LAW

KKB KK-2 TH 49 / 10 Chr p

Copyright: @ 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAKSI

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana criminal justice system maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih apabila keputusan pidana tersebut oleh masyarakat baik akademisi maupun praktisi dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana memandangnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah akibat hukum terhadap putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Korupsi dan upaya hukum apakah yang ditempuh terhadap putusan dalam kasus tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dengan UU Korupsi.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa akibat hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Korupsi tidak dapat dibenarkan, maka putusan tersebut adalah batal demi hukum, maksudnya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau putusan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Upaya hukum terhadap putusan yang tidak tepat ialah jaksa penuntut umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum biasa, meskipun dalam kasus-kasus yang digunakan sebagai acuan harus mengajukan upaya hukum biasa, yaitu banding pada Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada Mahkamah Agung, karena putusan hakim tersebut ada tendensi suatu kesengajaan dan hakim menggunakan asas kebebasan dalam memutuskan perkara yang berlebihan.

Keyword : Tindak pidana korupsi, batal demi hukum

ABSTRACT

In the criminal justice system occupies a central position. This is because the decision on the punishment would have broad consequences, both directly relating to criminal and society at large. Moreover, if the criminal decision by both academics and practitioners community deemed inappropriate, it will cause a reaction that controversial, because the truth in this case is relatively dependent nature of which looked at.

The problem in this research is whether the legal consequences of court decisions in criminal cases of corruption that does not comply with the provisions of the Corruption Act and whether remedies taken against the verdict in corruption case that does not comply with the Corruption Act.

This study used the type of research with statute approach and conceptual approach. Legal materials used are of primary law materials and secondary legal materials.

The results explain that the legal consequence of a court decision that does not comply with the provisions of the Corruption Act could not be justified, the decision is null and void, meaning that the decision is deemed not exist or the decision has no legal effect. Remedy against the decision that is not appropriate is the public prosecutor filed an appeal in the Supreme Court as the ordinary remedy, although in those cases that are used as a reference should file an ordinary law, namely an appeal to the Court of Appeal and Cassation at the Supreme Court, because the judge's decision that there is a perception of a deliberate and judges use the principle of freedom in deciding the case excessive.

Keywords: Corruption, null and void